



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 84 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD;
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.034.625.864.993,00 yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.106.105.872.349,00 yang terdiri atas :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.69.307.282.636,00. yang terdiri atas :

- a. Pajak Reklame sebesar Rp.1.000.000.000,00
- b. Pajak Air Tanah sebesar Rp.1.500.000.000,00
- c. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.50.000.000,00

- d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp.150.000.000,00
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp.7.000.000.000,00
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.10.000.000.000,00
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp.20.397.850.000,00
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp.29.209.432.636,00
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.241.607.200,00 yang terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.2.662.107.200,00
 - b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.179.500.000,00
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp.400.000.000,00
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.556.982.513,00. Yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp.3.556.982.513,00
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.30.000.000.000,00 yang terdiri atas :
- a. Jasa Giro sebesar Rp.3.500.000.000,00
 - b. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp.1.500.000.000,00
 - c. Pendapatan BLUD sebesar Rp.25.000.000.000,00,00

Pasal 6

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.919.111.438.670,00 yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.875.783.143.000,00 yang terdiri atas :
- a. Dana Desa sebesar Rp.59.972.090.000,00
 - b. Insentif Fiskal sebesar Rp.7.233.497.000,00
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 96.584.353.000,00
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.536.821.028.000,00
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.175.172.175.000,00
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.43.328.295.670,00 yang terdiri atas :
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp.19.562.783.553,00

- b. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp.703.753.408,00
- c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp.23.061.758.709,00

Pasal 8

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.9.408.553.974,00 yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp.9.408.553.974,00.

Pasal 9

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.058.939.816.989,00 yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.779.099.479.954,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.460.272.511.033,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.291.490.424.063,00
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp.140.965.596.350,00
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp.16.485.120.610,00
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.559.008.210,00
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp.617.728.000,00
 - f. Belanja Pegawai BOSP sebesar Rp.10.154.633.800,00
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.298.350.430.921,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang sebesar Rp.68.866.800.211,00
 - b. Belanja Jasa sebesar Rp.126.825.579.010,00
 - c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.19.452.223.853,00
 - d. Belana Perjalanan Dinas sebesar Rp.30.272.326.232,00
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.1.357.700.000,00
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp.21.473.269.398,00
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp.5.102.532.217,00

- h. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.25.000.000.000,00.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.921.538.000,00 yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp.2.180.048.000,00
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp.6.485.000.000,00
 - c. Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp.9.529.930.000,00
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.1.726.560.000,00
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.555.000.000,- yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.130.945.140.574,00 yang terdiri atas :
- a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.212.013.162,00 yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp.9.205.895,00
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp.5.257.551.481,00
 - c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.2.997.139.352,00
 - d. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemanca sebesar Rp.142.288.125,00
 - e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp.1.091.540.078,00
 - f. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp.937.960.000,00
 - g. Belanja Modal Komputer sebesar Rp.2.297.207.331,00
 - h. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebesar Rp.700.000.000,00
 - i. Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp.97.395.500,00
 - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebesar Rp.2.681.725.400,00
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.976.864.945,00 yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp.8.326.864.945,00
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp.650.000.000,00
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.98.283.397.433,00 yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp.96.210.382.693,00

- b. Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp.2.050.000.000,00
 - c. Belanja Modal Instalasi sebesar Rp.23.014.740,00
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.472.865.034,00 yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp.523.587.192,00
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp.9.106.440,00
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebesar Rp.6.940.171.402,00

Pasal 12

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp.18.327.679.377,00 yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp.130.567.517.084,00 yang terdiri atas :
- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.254.888.984,00 yang terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp.6.930.728.264,00
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.324.160.720,00
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.123.312.628.100,00 yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 14

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.24.313.951.996,00 yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 15

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.32.313.951.996,00 yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.32.313.951.996,00

Pasal 16

- (1) Pengeluaran pembiayaan` sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,00 yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000,00

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya ~~surplus~~/(defisit) sebesar Rp.24.313.951.996,00
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.24.313.951.996,00

Pasal 18

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 24 Desember 2024
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd

F U A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 84.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YAKUB ARIFIN, SH, MH.

NIP. 19810112 201101 1 003.



KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	106.105.872.349,00
4.1.01	Pajak Daerah	69.307.282.636,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.000.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	750.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	750.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	200.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	200.000.000,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	50.000.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	50.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.500.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.500.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.500.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	150.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	150.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.000.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	7.000.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	7.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	10.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	10.000.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	20.397.850.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.200.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	1.200.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	18.840.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	17.640.000.000,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	1.200.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	240.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	240.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	100.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	100.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	17.850.000,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	17.850.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	29.209.432.636,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	29.209.432.636,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	29.209.432.636,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.241.607.200,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.662.107.200,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	276.000.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	276.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.399.747.200,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.399.747.200,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	50.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	50.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	936.360.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	267.840.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	668.520.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	179.500.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	179.500.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	20.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	159.500.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	400.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	400.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	400.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.556.982.513,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.556.982.513,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.556.982.513,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.556.982.513,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.000.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	3.500.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.500.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.500.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	25.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	25.000.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	25.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	919.111.438.670,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	875.783.143.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	59.972.090.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	59.972.090.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	59.972.090.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.233.497.000,00
4.2.01.06.03	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	7.233.497.000,00
4.2.01.06.03.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	7.233.497.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	96.584.353.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	69.051.797.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	58.371.954.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	9.389.494.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	966.252.000,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	324.097.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	20.863.293.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	15.730.621.000,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	1.007.000,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	114.588.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	3.596.950.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	603.692.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	816.435.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	6.669.263.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	6.669.263.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	536.821.028.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	402.686.364.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	402.686.364.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	134.134.664.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	400.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	3.308.148.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	64.962.936.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	39.335.284.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	26.128.296.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	175.172.175.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	39.982.306.000,00
4.2.01.09.01.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	399.965.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.01.0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	413.256.000,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	2.500.000.000,00
4.2.01.09.01.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	893.000.000,00
4.2.01.09.01.0077	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	35.776.085.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	135.189.869.000,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	44.746.400.000,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.393.250.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	3.253.900.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	60.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.281.180.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	7.675.921.000,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	5.481.251.000,00
4.2.01.09.02.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	68.055.108.000,00
4.2.01.09.02.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	476.259.000,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.721.600.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.328.295.670,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	43.328.295.670,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	43.328.295.670,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.562.783.553,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	703.753.408,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	23.061.758.709,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.408.553.974,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.408.553.974,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.408.553.974,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.408.553.974,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.408.553.974,00
	Jumlah Pendapatan	1.034.625.864.993,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	779.099.479.954,00
5.1.01	Belanja Pegawai	460.272.511.033,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	291.490.424.063,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	214.138.031.150,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	154.330.337.834,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	59.807.693.316,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	25.907.873.498,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	22.257.210.820,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.650.662.678,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.715.589.206,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.639.909.206,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	75.680.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.319.339.883,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.265.684.451,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.053.655.432,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.487.256.459,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.263.487.357,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	223.769.102,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	12.606.148.332,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.951.131.023,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.655.017.309,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	699.718.029,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	610.145.252,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	89.572.777,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	28.240.382,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.119.446,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.120.936,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	13.314.220.545,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.202.729.613,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.111.490.932,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	873.334.472,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	766.330.856,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	107.003.616,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.271.335.507,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.044.957.773,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	226.377.734,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.129.336.600,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.129.336.600,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	140.965.596.350,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	65.819.330.350,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	65.390.306.883,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	429.023.467,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	980.000.000,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	980.000.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	5.474.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	5.474.000.000,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	68.692.266.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	68.055.108.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	476.259.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	160.899.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.485.120.610,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	844.603.200,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	844.603.200,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	118.244.448,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	118.244.448,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.943.200,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.943.200,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	84.460.320,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	84.460.320,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.224.674.640,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.224.674.640,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	142.264.836,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	142.264.836,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	52.486.056,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	52.486.056,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.762.800.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.762.800.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.190.700.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.190.700.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	504.000.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	504.000.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.441.291.110,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	95.290.928,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.500.045,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	13.500.137,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.328.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.615.680.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.615.680.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	361.972.800,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	361.972.800,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	559.008.210,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	199.294.931,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	199.294.931,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	15.943.200,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	15.943.200,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	301.939.072,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	301.939.072,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	18.104.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	18.104.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.057.279,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.057.279,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	9.200,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	9.200,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	20.687.088,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	20.687.088,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	243.360,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	243.360,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	730.080,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	730.080,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	617.728.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	217.728.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	217.728.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	10.154.633.800,00
5.1.01.89.01	Belanja Pegawai BOSP-BOS	10.154.633.800,00
5.1.01.89.01.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler	10.154.633.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.350.430.921,00
5.1.02.01	Belanja Barang	68.866.800.211,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	68.607.636.783,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	56.648.245,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	827.720.249,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	61.503.676,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	116.771.701,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	25.124.820,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	45.532.200,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	103.569.617,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	9.332.820,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.580.128.525,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	16.876.493,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	393.717,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.444.630.711,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.067.395.566,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.400.128.658,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	193.805.143,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.332.153.835,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.024.093.215,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.285.874.321,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	44.959.174,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	44.389.728,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	862.461.053,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	322.057.529,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.784.901.844,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	79.850.419,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.387.956.817,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	6.472.110.676,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	7.731.873.335,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	149.096.655,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.938.674.666,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.366.596.464,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	438.160.767,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	494.859.654,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	54.784.382,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	712.292.465,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	129.806.762,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	6.922.692,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	11.192.290,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	12.669.620,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	24.683.295,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	637.538.186,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	221.972.798,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	86.142.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	259.163.428,00
5.1.02.01.04.0082	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	12.422.206,00
5.1.02.01.04.0116	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	52.302,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	28.520.590,00
5.1.02.01.04.0448	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	57.536.900,00
5.1.02.01.04.0450	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	160.631.430,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	126.825.579.010,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	94.717.459.156,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	65.852.165,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.556.400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.491.265.855,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	5.900.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	314.356.176,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	117.493.819,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	3.500.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	246.600.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	496.800.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	16.305.240.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	12.595.805.837,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	115.200.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	574.600.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.373.200.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	433.200.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	48.000.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	768.000.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	72.000.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	126.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	33.667.667,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.423.175.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.245.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.886.024.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.984.660.158,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.730.500.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	829.200.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	36.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.181.200.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	450.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	456.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	215.700.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	25.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	702.000.000,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	53.326.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.332.894.492,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	33.252.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	596.917.564,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	86.400.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	330.100.540,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	16.791.587.783,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	489.986.967,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.393.329.467,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	5.760.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	443.985.958,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	126.527.708,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	205.860.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	889.790.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	18.356.043.151,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.258.922.496,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	13.683.297.600,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	674.587.200,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.500.000.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.020.000.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	219.235.855,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	30.000.000,00
5.1.02.02.03.0007	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.193.978.615,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	19.075.280,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	46.029.490,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	121.085.350,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	572.905.848,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	8.537.289,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	885.754.865,00
5.1.02.02.04.0125	Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat	15.757.840,00
5.1.02.02.04.0127	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat	246.337.255,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	147.589.292,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	3.910.356,00
5.1.02.02.04.0453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	126.995.750,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.314.518.148,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	390.000.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	119.753.686,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	619.284.407,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5.332.600,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	138.541.895,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	36.450.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	944.078.785,00
5.1.02.02.05.0044	Belanja Sewa Motel	1.076.775,00
5.1.02.02.05.0046	Belanja Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	60.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.452.220,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	3.452.220,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.441.316.870,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	2.156.500.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	50.000.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	1.986.050.350,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.058.875.000,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0029	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	89.891.520,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	276.800.000,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	1.000.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	25.000.000,00
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	800.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	250.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	600.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	600.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.892.010.850,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	982.621.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	909.389.850,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	19.452.223.853,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.116.937.653,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	109.862.550,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	114.536.460,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	253.444.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	195.578.826,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	167.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.727.990.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	482.430.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	817.700.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	920.588.000,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	20.240.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	368.440.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	29.919.162,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	99.920.338,00
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	200.165.892,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	457.990.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	16.740.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	83.792.425,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.575.286.200,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.218.786.200,00
5.1.02.03.03.0005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	100.000.000,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	2.401.500.000,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.665.000.000,00
5.1.02.03.03.0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	190.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.760.000.000,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.100.000.000,00
5.1.02.03.04.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi	100.000.000,00
5.1.02.03.04.0068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	110.000.000,00
5.1.02.03.04.0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	350.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30.272.326.232,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.272.326.232,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.949.338.232,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	4.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.496.805.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.220.630.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.601.553.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.357.700.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.357.700.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	816.300.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	541.400.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	21.473.269.398,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	18.176.089.398,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	16.782.839.398,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.393.250.000,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	3.297.180.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	3.237.180.000,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	60.000.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.102.532.217,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.102.532.217,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.102.532.217,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.000.000.000,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.000.000.000,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	19.921.538.000,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.180.048.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.180.048.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.180.048.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.485.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.810.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.810.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	500.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	500.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.175.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.175.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	9.529.930.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	4.923.750.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	4.923.750.000,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	3.280.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	3.280.000.000,00
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	1.326.180.000,00
5.1.05.06.04.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	1.326.180.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.726.560.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.726.560.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.726.560.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	555.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	555.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	555.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	555.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	130.945.140.574,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.212.013.162,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	9.205.895,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	9.205.895,00
5.2.02.01.03.0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	9.205.895,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.257.551.481,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.257.551.481,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.179.486.331,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.078.065.150,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.997.139.352,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	437.569.531,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	76.524.854,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	361.044.677,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.502.093.948,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.051.446.095,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	3.279.600,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	199.266.406,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	16.916.452,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	152.785.675,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	78.399.720,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	57.475.873,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	17.233.940,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	40.241.933,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	142.288.125,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	142.288.125,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	142.288.125,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.091.540.078,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.091.540.078,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	252.035.940,00
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	208.000.000,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	575.254.359,00
5.2.02.07.01.0016	Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	56.249.779,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	937.960.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	937.960.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	787.960.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	150.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.297.207.331,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.718.430.875,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.718.430.875,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	578.776.456,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	51.867.401,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	505.982.229,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	20.926.826,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	700.000.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	700.000.000,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	400.000.000,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	300.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	97.395.500,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	97.395.500,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	97.395.500,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	2.681.725.400,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	2.681.725.400,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	2.681.725.400,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.976.864.945,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	8.326.864.945,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.326.864.945,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.166.864.945,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.590.000.000,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	600.000.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	970.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	650.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	650.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	650.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.283.397.433,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	96.210.382.693,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	60.110.382.693,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	59.680.382.693,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	430.000.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	36.100.000.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	36.000.000.000,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	100.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	2.050.000.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	200.000.000,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	200.000.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	750.000.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	750.000.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.100.000.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.100.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	23.014.740,00
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	23.014.740,00
5.2.04.03.06.0002	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi	23.014.740,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.472.865.034,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	523.587.192,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	523.587.192,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	99.883.860,00
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat	6.812.360,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	2.589.160,00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	3.037.940,00
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	10.719.104,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	4.374.648,00
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	3.314.120,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	392.856.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	9.106.440,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	9.106.440,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	9.106.440,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	6.940.171.402,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	6.923.451.402,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	6.923.451.402,00
5.2.05.89.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	16.720.000,00
5.2.05.89.02.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	16.720.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	18.327.679.377,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	18.327.679.377,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	18.327.679.377,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	18.327.679.377,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	18.327.679.377,00
5.4	BELANJA TRANSFER	130.567.517.084,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.254.888.984,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	6.930.728.264,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.930.728.264,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.930.728.264,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	324.160.720,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	324.160.720,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	324.160.720,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	123.312.628.100,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	123.312.628.100,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	123.312.628.100,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	59.972.090.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	63.340.538.100,00
	Jumlah Belanja	1.058.939.816.989,00
	Total Surplus/(Defisit)	-24.313.951.996,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	32.313.951.996,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	32.313.951.996,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	32.313.951.996,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	32.313.951.996,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	32.313.951.996,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	8.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	8.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	8.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	24.313.951.996,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Labuhanbatu Selatan, 24 Desember 2024

Bupati

ttd

H. EDIMIN